

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM KOLABORASI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA**

Putri Sakila Usemahu

NPP. 32.1028

Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: 32.1028@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. H. M. Irwan Tahir, AP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Ternate City, as part of the island region in North Maluku Province, is highly vulnerable to natural disasters, one of which is flooding. High rainfall, lowland topography, and suboptimal drainage infrastructure are the main contributing factors to flooding in this area. According to data from the Flash Flood Disaster Post in Rua Subdistrict, Ternate City, a total of 19 people were reported dead and 8 others injured. Additionally, 25 houses and places of worship were severely damaged. Flood disaster management requires the involvement and collaboration of various parties, including government agencies, the community, the private sector, and academia. **Purpose:** This study aims to describe the role of the Ternate City Regional Disaster Management Agency (BPBD) in establishing cross-sector collaboration in flood disaster management, as well as to identify the obstacles and efforts undertaken to overcome these factors. **Method:** The method used is a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out using NVivo 12 Plus software to map the roles and collaborations among stakeholders. **Result:** The results of the study show that BPBD plays a key coordinating role in the disaster management process, starting from the pre-disaster stage (education, training, and simulations), the emergency response stage (evacuation, establishment of command posts, information dissemination), to the post-disaster stage (rehabilitation and reconstruction). Collaboration is established with the mass media, academia, the private sector, and the community. However, several challenges persist, such as recurrent flooding, access difficulties, coordination issues, and a lack of public awareness. To overcome these obstacles, BPBD has strengthened the early warning system, developed alternative route maps, established an integrated command system, and implemented educational programs for the community. **Conclusion:** Therefore, the effectiveness of flood disaster management heavily depends on the strength of cross-sector collaboration and the active role of BPBD as the main driving force and field coordinator. **Keywords:** Role, BPBD, Collaboration, Disaster Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Ternate sebagai bagian dari wilayah kepulauan di Provinsi Maluku Utara memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam, salah satunya adalah banjir. Curah hujan yang tinggi, topografi dataran rendah, serta infrastruktur drainase yang belum optimal menjadi faktor utama penyebab banjir di wilayah ini. Menurut data dari Posko Bencana Banjir Bandang di Kelurahan Rua Kota Ternate, tercatat sebanyak 19 orang meninggal dunia dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, sebanyak 25 rumah beserta tempat ibadah mengalami kerusakan parah. Penanggulangan bencana banjir membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, pihak swasta maupun akademisi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate dalam menjalin kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana banjir, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor faktor tersebut. **Metode:** Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk memetakan peran dan kolaborasi yang terjalin antar pemangku kepentingan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD berperan sebagai koordinator utama dalam proses penanggulangan bencana, mulai dari tahap pra bencana (edukasi, pelatihan, dan simulasi), tahap tanggap darurat (evakuasi, pendirian posko, penyebaran informasi), hingga tahap pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Kolaborasi dijalin bersama media massa, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Namun, terdapat sejumlah hambatan seperti terjadinya banjir susulan, kesulitan akses, sulitnya koordinasi serta kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BPBD memperkuat sistem peringatan dini, membuat peta jalur alternatif, membangun sistem komando terpadu, dan menyelenggarakan program edukasi untuk masyarakat. **Kesimpulan:** Dengan demikian, efektivitas penanggulangan bencana banjir sangat bergantung pada kekuatan kolaboratif antar sektor serta peran aktif BPBD sebagai penggerak utama atau koordinator lapangan.

Kata kunci: Peran, BPBD, Kolaborasi, Penanggulangan Bencana

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang disebabkan oleh alam dan mengakibatkan kerusakan serta kerugian terhadap lingkungan dan kehidupan. Menurut (Li dkk., 2025) *Flood management is widely recognized as an effective way to reduce the adverse consequences, and a more resilient and sustainable flood management approach has been the goal in recent studies*. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sangat rawan dengan bencana alam karena posisi geologis Indonesia yang berada di lingkaran api pasifik. Dengan kondisi ini, di Indonesia sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, gunung Meletus, tsunami, tanah longsor dan banjir. Seperti yang diungkapkan Earl dkk. (2023) *Tropical island communities face substantial hydrometrological threats, including flood inundation*. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan frekuensi bencana alam tertinggi di dunia, yang tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga korban jiwa serta dampak sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendapat Yahya, Kusmana, Ismunarta, dan Sururama (2024) masalah publik tidak hanya dihadapi oleh masing-masing pihak yang terdampak tetapi dihadapi oleh seluruh pihak yang terdampak (Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat). Bencana alam terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor seperti kondisi geologis, iklim tropis, topografi, serta kurangnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Selain

itu, kerentanan infrastruktur untuk menahan dampak bencana, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya manajemen risiko bencana, turut memperkeruh kondisi di lapangan saat terjadi bencana alam.

Banjir di Indonesia sering terjadi, terutama di daerah perkotaan yang secara geografis terletak di dataran rendah dan dipengaruhi oleh aliran sungai sungai besar, sangat rentan terhadap banjir. *Floods are among the most destructive natural disasters, causing significant loss of life, property damage, and disruption to communities (Bukhari dkk., 2024)* Fenomena banjir ROB atau banjir pasang air laut juga sering terjadi di wilayah pesisir pantai, yang disebabkan oleh penurunan permukaan tanah serta kenaikan permukaan air laut. Dampak banjir yang terjadi tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas hidup, serta dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Telah banyak upaya dari pemerintah dalam menangani banjir seperti membangun waduk, memperbaiki saluran drainase, melakukan reboisasi, meningkatkan sistem pemantauan cuaca dan memberikan informasi terkini terkait potensi banjir, serta mengadakan sosialisasi tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir. Namun, upaya upaya tersebut belum sepenuhnya dapat menanggulangi permasalahan banjir.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 1.255 kejadian banjir di Indonesia pada 2023. Jumlahnya turun 18,03% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebanyak 1.531 kejadian. Bencana banjir sempat mengalami lonjakan tertinggi sebesar 93,62% menjadi sebanyak 1.518 kejadian. Banyaknya kejadian banjir di Indonesia turut menimbulkan korban. BNPB mencatat, sebanyak 92 orang meninggal, 4.788 orang luka-luka, dan 3,87 juta orang menderita dan mengungsi. Selain itu, bencana banjir juga menimbulkan kerusakan rumah penduduk. Tercatat, ada 1.196 rumah rusak berat, 932 rusak sedang, 16.116 rusak ringan, dan 753.788 rumah terendam akibat banjir. lebih lanjut, sebanyak 314 banjir telah melanda Indonesia sejak 1 Januari-15 Maret 2024.

Provinsi Maluku Utara terdiri dari rangkaian pulau-pulau besar dan kecil yang memiliki karakteristik wilayah pesisir, dataran rendah, dan daerah perbukitan. Kondisi geografis ini membuat Maluku Utara menjadi wilayah yang rawan terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan banjir. Keberadaan lempeng tektonik aktif di sekitar wilayah ini juga menyebabkan tingginya potensi gempa bumi hingga berpotensi terjadinya tsunami, sementara curah hujan yang tinggi dapat berpotensi menimbulkan banjir serta tanah longsor, terutama pada musim penghujan. Setiap tahun, bencana alam yang terjadi di Maluku Utara memberikan dampak negatif bagi masyarakat salah satunya di Kota Ternate.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kota Ternate yang terletak di Maluku Utara berada dalam wilayah cincin api (ring of fire), sehingga memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Ancaman bencana di wilayah ini tidak hanya terbatas pada aktivitas gunung berapi, tetapi juga mencakup banjir, gempa bumi, dan tsunami. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate, terdapat empat jenis bencana utama yang menjadi perhatian serius, yaitu erupsi Gunung Gamalama, banjir, tanah longsor, dan potensi tsunami.

Tabel 1. 1

Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan, Kota Ternate 2023

Kecamatan	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam
Pulau Ternate	1	-	1	-
Moti	-	-	-	-
Pulau Batang Dua	-	-	-	-
Pulau Hiri	-	-	-	-
Ternate Barat	-	1	1	-
Ternate Selatan	4	1	2	-
Ternate Tengah	1	-	-	-
Ternate Utara	1	-	-	-
Kota Ternate	7	2	4	0

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwasanya bencana alam di Kota Ternate menimbulkan dampak negatif dari menimbulkan korban jiwa hingga kerusakan infrastruktur pada wilayah yang terkena dampak dari bencana alam. Sebagai representasi Negara, pemerintah menjadi satu-satunya lembaga atau organisasi yang memiliki legitimasi yang kuat atas setiap warga negaranya (Zulkifli & Tahir, 2023). Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah Kota Ternate dalam penanggulangan bencana khususnya pada bencana banjir, tetapi peristiwa banjir yang terjadi masih menunjukkan bahwa upaya dalam penanggulangan bencana masih belum berjalan maksimal.

Banjir merupakan suatu bencana yang kerap terjadi di Kota Ternate, mulai dari banjir bandang yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi hingga banjir rob yang disebabkan oleh permukaan air laut yang lebih tinggi dibandingkan dengan daratan di tepi pantai. Pada hari Minggu, 25 Agustus 2024, Kelurahan Rua dilanda banjir bandang akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kota Ternate. Menurut data dari Posko Bencana Banjir Bandang di Rua, tercatat sebanyak 19 orang meninggal dunia dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, sebanyak 25 rumah beserta tempat ibadah mengalami kerusakan parah, dan satu jembatan penghubung di jalan utama antar-kelurahan di Pulau Ternate dilaporkan putus. Sekitar 60 Kartu Keluarga, yang mencakup ratusan jiwa, terpaksa dievakuasi ke lokasi-lokasi yang lebih aman di wilayah Kelurahan Rua. Banjir bandang tersebut membawa serta material dari pegunungan seperti tanah, pasir, dan batu, yang kemudian menghantam sejumlah area di kelurahan tersebut.

Peta Kawasan Rawan Bencana milik Pemerintah Kota Ternate sudah kedaluarsa sejak tahun 2017 dan baru diperbarui ketika banjir bandang telah melanda Kelurahan Rua. Dampak dari banjir bandang di Kelurahan Rua dapat diminimalkan apabila acuan peta terbaru telah tersedia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, mengingat Kota Ternate merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Ketua

Ikatan Ahli Geologi Indonesia Wilayah Maluku Utara, Deddy Arif, mengungkapkan bahwa peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) milik Pemerintah Kota Ternate belum mengalami pembaruan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, keberadaan peta tersebut sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan mitigasi bencana. Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate (BPBD), dinilai kurang tanggap terkait hal ini. Pembaruan peta KRB diperlukan untuk melihat faktor faktor pembangunan yang berpotensi menyebabkan bencana. Pembaruan KRB juga penting sebagai acuan pemerintah yang akan merelokasi para pengungsu banjir bandang.

Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan beberapa langkah dalam upaya penanggulangan bencana, di antaranya adalah penyuluhan kepada masyarakat serta pelatihan bagi aparat yang terkait. Dari total 58 kelurahan yang ada di Kota Ternate, baru sebagian kecil yang telah membentuk kelurahan tangguh bencana, seperti Kelurahan Tabam, Tubo, Sangaji Utara, dan Loto. Hal ini menunjukkan bahwa baru sekitar 6,8% dari masyarakat Kota Ternate yang memiliki pemahaman mengenai penanggulangan bencana. Penyediaan informasi mitigasi bencana di ruang-ruang publik juga masih belum optimal, terlihat dari minimnya papan petunjuk jalur evakuasi di jalan-jalan, serta kurang maksimalnya penyebaran informasi melalui media sosial dan media cetak. Selain itu, belum tersedia buku panduan atau informasi kewaspadaan dini bagi pendatang baru di Kota Ternate, sehingga keberadaan dan peran media massa sangat penting dalam menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat secara luas.

Pihak swasta memiliki potensi besar dalam mendukung penanggulangan bencana melalui kontribusi finansial, penyediaan sumber daya logistik, pengembangan teknologi, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility* atau *CSR*). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang mendorong partisipasi sektor swasta, khususnya dalam fase tanggap darurat maupun rehabilitasi pasca bencana banjir. Namun kenyataannya, pelibatan sektor swasta melalui program *CSR* masih bersifat insidental. Padahal, integrasi *CSR* ke dalam sistem manajemen bencana bisa memperkuat ketahanan daerah secara lebih berkelanjutan. Selain itu, dalam menghadapi situasi bencana, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Namun, hingga saat ini, masih terdapat keterbatasan kajian akademik terkait penanggulangan bencana.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana di berbagai daerah di Indonesia. DN Sekartaji dkk. (2022) dalam penelitiannya di Kota Baubau menyatakan bahwa BPBD telah menunjukkan kinerja yang baik melalui penetapan peraturan daerah serta pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana. Selanjutnya, N Sahira (2023) di Kabupaten Aceh Utara mengungkapkan bahwa BPBD menerapkan pendekatan tiga tahap, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, namun masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah rawan banjir. Penelitian A Setiawan dkk. (2024) di Kota Balikpapan menunjukkan pentingnya pemetaan wilayah rawan serta pelaksanaan rehabilitasi pasca banjir secara berkelanjutan. Saipullah Hasan dkk. (2024) di Kabupaten Magelang menyoroti inovasi teknologi yang dilakukan BPBD melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan (SIKK) untuk mempermudah distribusi informasi kepada masyarakat. Sri Indarti dkk. (2023) mencatat bahwa meskipun BPBD Kota Bengkulu telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen bencana, efektivitas implementasinya masih

perlu ditingkatkan.

Sementara itu, Tri Anggraini & Dimas Agustian (2021) dalam penelitiannya di Kabupaten Musi Banyuasin menemukan bahwa BPBD fokus pada upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan kajian risiko dan sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian Hendra Irawan Umabaihi dkk. (2022) di Kabupaten Kepulauan Sula mengungkapkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya serta minimnya keterlibatan institusi akademik. Di Kabupaten Lumajang, Alnizar Zagarino dkk. (2021) mendapati bahwa BPBD melaksanakan peran tanggap darurat dan rehabilitasi pasca erupsi Gunung Semeru secara sistematis sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pujianti & Gerry Katon Mahendra (2023) meneliti BPBD Kota Yogyakarta yang menjalankan fungsinya berdasarkan peran-peran organisasi yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, seperti peran sebagai inovator, pelopor, dan pelaksana lapangan. Terakhir, Irvan Harnanda (2021) dalam penelitiannya di Provinsi Riau menunjukkan bahwa BPBD telah melibatkan masyarakat dan sektor swasta dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui pendekatan mitigatif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu karena mengangkat tema yang berbeda dan belum pernah dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks Kota Ternate sebagai wilayah kepulauan yang rentan terhadap bencana banjir. Berbeda dengan studi sebelumnya yang umumnya hanya membahas peran teknis BPBD dalam tahapan penanggulangan bencana, penelitian ini secara khusus menyoroti peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate dalam membangun kolaborasi lintas sektor berbasis pendekatan Penta Helix, yang melibatkan lima aktor utama: pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa.

Pendekatan Penta Helix yang digunakan dalam penelitian ini memberikan kontribusi baru karena menempatkan BPBD bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai fasilitator kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan dalam setiap tahap penanggulangan bencana—pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca-bencana. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk memetakan pola interaksi dan keterlibatan masing-masing aktor secara visual dan tematik, sesuatu yang belum ditemukan dalam studi-studi sebelumnya.

Penelitian ini berbeda dari Sekartaji dkk. (2022) yang menekankan kebijakan daerah di Kota Baubau tanpa menyentuh aspek kolaboratif lintas sektor; dari Sahira (2023) di Aceh Utara yang hanya mengulas peran BPBD dalam tiga tahap penanganan tanpa melibatkan media dan dunia usaha; serta dari Setiawan dkk. (2024) di Balikpapan yang fokus pada rehabilitasi tanpa meninjau koordinasi multipihak. Demikian pula, penelitian Hasan dkk. (2024) di Kabupaten Magelang yang menonjolkan inovasi aplikasi digital (SIKK) tanpa membahas dinamika kolaboratif antaraktor, serta Indarti dkk. (2023) di Bengkulu yang menilai pelaksanaan penanggulangan banjir dari segi efektivitas internal BPBD, bukan jejaring kerja lintas sektor. Penelitian Umabaihi dkk. (2022) di Kepulauan Sula bahkan menunjukkan lemahnya kolaborasi karena kurangnya keterlibatan akademisi, hal yang justru dibahas dan dianalisis secara lebih mendalam dalam penelitian ini. Berbeda pula dengan Pujianti & Mahendra (2023) di Yogyakarta yang fokus pada peran struktural BPBD sebagai inovator tanpa mengeksplorasi pendekatan Penta Helix, dan Anggraini & Agustian (2021) di Musi Banyuasin serta Harnanda (2021) di Riau yang membahas bencana kebakaran hutan dan lahan, bukan banjir, serta tanpa pendekatan kolaboratif.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah yang baru dalam bidang manajemen bencana, yakni dengan menekankan bahwa efektivitas penanggulangan bencana banjir

tidak hanya ditentukan oleh kapasitas teknis lembaga, tetapi juga oleh sejauh mana BPBD mampu menjadi penggerak utama kolaborasi lintas sektor dalam konteks tata kelola bencana yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BPBD dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan BPBD Kota Ternate dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

II. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada eksplorasi mendalam dari fenomena atau masalah yang sedang diteliti. Menurut Simangunsong (2017), menjelaskan bahwa “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan filsafat postpositivisme sebagai landasan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, instrument utamanya adalah peneliti, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna”.

Data pendekatan kualitatif biasanya dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada interaksi sosial, proses koordinasi, dan dinamika kolaboratif antar berbagai aktor dalam penanggulangan bencana, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif atau melalui pengukuran statistik semata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Induktif yang mana bertujuan untuk memahami fenomena tertentu untuk menghasilkan temuan yang bersifat konseptual, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan.

Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Plus, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan-temuan tematik dari data kualitatif yang dikumpulkan. Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih subjek yang memiliki kapasitas, kewenangan, dan pengalaman langsung dalam proses penanggulangan bencana di Kota Ternate. Informan kunci terdiri dari pejabat struktural di BPBD Kota Ternate, tokoh masyarakat, perwakilan sektor swasta, media lokal, serta akademisi. Mereka dipilih karena perannya yang strategis dan keterlibatannya langsung dalam proses kolaborasi lintas sektor dalam penanganan banjir. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara tepatnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate, karena lembaga tersebut berperan sentral sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan banjir di wilayah Kota Ternate. Adapun waktu pelaksanaan berlangsung selama tiga minggu mulai dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 24 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis, dikemukakan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir dapat ditinjau dari:

3.1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Kolaborasi Penanggulangan

Bencana Banjir di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran strategis dan sentral dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Ternate, termasuk dalam membangun kolaborasi lintas sektor (Pemerintah, Pihak Swasta, Akademisi, Masyarakat, dan Media Massa). Berikut merupakan hasil pembahasan terkait peran BPBD dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Ternate berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dianalisis menggunakan NVivo 12 Plus.

3.1.1 BPBD Sebagai Koordinator Utama dalam Penanggulangan Bencana

BPBD bertindak sebagai pengendali utama dalam upaya penanggulangan bencana banjir, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga tahap pemulihan. Sebagai leading sektor, BPBD bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan berbagai pihak selama proses penanggulangan bencana berlangsung. BPBD Kota Ternate memiliki peran penting sebagai koordinator utama dalam proses penanggulangan bencana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Kepala BNPB No.3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPBD. Dalam konteks ini, BPBD bertugas mengoordinasikan seluruh upaya pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca bencana bersama berbagai pihak lintas sektor. Sebagai leading sektor, BPBD bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai pihak guna memastikan respons bencana yang lebih efektif dan efisien.

1. Pra Bencana

Dalam tahapan pra bencana, BPBD telah membangun kapasitas masyarakat dan pihak terkait melalui berbagai kegiatan edukasi, simulasi, pelatihan bencana, serta workshop yang dilakukan dengan berkolaborasi dengan media massa dan akademisi.

2. Tanggap Darurat

Pada tahapan tanggap darurat, BPBD melakukan asesmen awal, mengevakuasi masyarakat terdampak, membangun tempat pengungsian, serta mendirikan posko darurat dan juga berkoordinasi dengan pihak lain untuk mendapatkan respon yang lebih cepat. Selain itu, BPBD bekerja sama dengan media massa dalam menyebarkan informasi ke masyarakat terkait kondisi saat tanggap darurat.

3. Pasca Bencana

Rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh BPBD dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dengan menyalurkan segala bentuk bantuan logistik serta pembangunan infrastruktur.

3.1.2 Kolaborasi Dengan Pihak Terkait

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam keberhasilan penanggulangan bencana di Kota Ternate. BPBD sebagai koordinator utama menyadari bahwa penanggulangan bencana, khususnya banjir yang sudah menjadi isu nasional, tidak dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, kerja sama yang terstruktur dengan berbagai pihak sangat diperlukan. Dalam pelaksanaannya, BPBD menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai instansi pemerintah, baik tingkat kota maupun dinas terkait. Pemerintah berperan dalam penyediaan anggaran dan mobilisasi sumber daya, sementara dinas seperti Dinas Sosial bertanggung jawab dalam pengelolaan dapur umum, Dinas PUPR dan Perkim menangani rekonstruksi hunian, serta Dinas Kesehatan, Damkar, TNI-Polri, dan Basarnas yang ikut terlibat.

1. Kolaborasi Dengan Media Massa

Media massa berkolaborasi dengan BPBD dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran seperti media sosial maupun media cetak. BPBD selalu terbuka dengan informasi yang disampaikan ke media, dengan menyediakan data dan informasi terkini dari lapangan. Untuk mencegah adanya informasi yang simpang siur, BPBD membentuk media center dan mengadakan rapat koordinasi dengan media, yang bertujuan agar semua informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki satu narasi yang seragam.

2. Kolaborasi Dengan Akademisi

BPBD menyelenggarakan kegiatan pelatihan, workshop, dan kegiatan edukatif untuk masyarakat dengan berkolaborasi bersama akademisi yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Akademisi juga berperan dalam membuat kajian dan penyusunan peta risiko bencana.

3. Kolaborasi Dengan Pihak Swasta

Pihak swasta dalam berkolaborasi dengan BPBD berperan memberikan bantuan logistik maupun turun langsung dalam proses evakuasi untuk membantu BPBD dalam mempercepat proses penanggulangan bencana. Selain itu, pihak swasta juga membantu dengan menyediakan bahan bakar dan operasional alat berat dan juga minyak tanah yang kemudian disalurkan ke dapur umum.

4. Kolaborasi Dengan Masyarakat

BPBD memberikan edukasi untuk masyarakat agar lebih paham bagaimana Ketika bencana terjadi dan juga melakukan simulasi evakuasi. Selain itu, BPBD bekerjasama dengan masyarakat melalui desa Tangguh bencana untuk membangun sistem peringatan dini. BPBD juga akan meningkatkan pelatihan kebencanaan di sekolah sekolah dan komunitas lokal serta melakukan workshop tentang bencana secara rutin.

3.2. Faktor Penghambat

Dalam upaya penanggulangan bencana banjir, BPBD memiliki tanggung jawab besar sebagai koordinator utama di tingkat daerah. Namun, dalam implementasinya, BPBD menghadapi berbagai faktor penghambat yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan kolaborasi lintas sektor. Faktor faktor ini tidak hanya berasal dari internal lembaga, tetapi juga dari eksternal seperti masyarakat, sektor swasta, hingga aspek regulasi dan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang didapatkan selama kegiatan penelitian terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Ternate sebagai berikut.

1. Banjir Susulan

BPBD tentunya sudah dengan maksimal dalam proses penanggulangan bencana banjir, tetapi tetap saja terdapat sejumlah hambatan yang terjadi di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah munculnya banjir susulan. Saat proses mengevakuasi para korban, BPBD mengalami kendala terkait banjir susulan yang terjadi sehingga menghambat proses evakuasi. Pada saat banjir susulan ini, jalanan yang merupakan akses utama dalam menyalurkan bantuan ikut terputus sehingga proses penanggulangan bencana menjadi terhambat. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses evakuasi dan penyaluran bantuan, tetapi juga memperbesar risiko terhadap keselamatan warga dan

petugas.

2. Kesulitan Akses

Hambatan berikutnya adalah kesulitan akses menuju lokasi terdampak. Material longsor yang kemudian menutup jalan menyebabkan jembatan menjadi rusak, dan akses jalan satu-satunya tertutup. Kesulitan akses ini memperlambat waktu tanggap darurat dan kemudian menyebabkan keterlambatan bantuan medis maupun pangan. Untuk mengatasinya, BPBD perlu bekerja sama dengan instansi lain seperti TNI, Polri, dan pihak swasta yang memiliki armada atau peralatan berat. Namun, koordinasi ini juga tidak selalu mudah dilakukan.

3. Sulitnya Koordinasi

Hambatan lainnya yang sering muncul adalah sulitnya berkoordinasi dengan lintas sektor. Penanggulangan bencana melibatkan berbagai pihak mulai dari media massa, akademisi, pihak swasta hingga masyarakat. Tidak semua sektor memiliki system komunikasi yang terintegrasi, sehingga sering terjadi tumpang tindih peran atau bahkan kekosongan tanggung jawab di lapangan.

4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat masih kurang kesadaran dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Banyak masyarakat yang menganggap bencana banjir sebagai peristiwa yang biasa dan berulang sehingga seringkali mengabaikannya. Selain itu, perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan, seperti membuang sampah di sembarang tempat, memperparah risiko bencana.

3.3. Upaya

BPBD tentunya sudah dengan maksimal dalam proses penanggulangan bencana. Untuk menghadapi kompleksitas penanggulangan bencana banjir, BPBD terus melakukan berbagai upaya terpadu untuk mengatasi segala hambatan yang terjadi, mulai dari ancaman banjir susulan hingga rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Upaya yang dibangun BPBD antara lain yaitu:

1. Penguatan Sistem Peringatan Dini

Dengan menjadikan beberapa desa sebagai desa Tangguh bencana, BPBD tidak hanya memperluas jangkauan sistem peringatan dini, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat setempat dilibatkan secara aktif dalam proses kesiapsiagaan bencana.

2. Peta Jalur Evakuasi

Peta jalur alternatif evakuasi menjadi langkah krusial, terutama Ketika akses utama menuju lokasi bencana terputus atau tidak dapat dilalui. Upaya ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Ternate tidak hanya fokus pada evakuasi darurat, tetapi juga mengantisipasi kemungkinan hambatan di lapangan dengan merencanakan jalur alternatif.

3. Sistem Komando Terpadu

Melalui rapat koordinasi yang rutin dilakukan, BPBD Kota Ternate berupaya memastikan setiap instansi atau lembaga yang terlibat memiliki pemahaman dan peran yang selaras dalam menghadapi situasi darurat.

4. Menyelenggarakan Program Edukasi

BPBD selalu berupaya untuk meningkatkan pelatihan tentang kebencanaan di sekolah dan komunitas lainnya dengan melaksanakan workshop secara rutin mengenai penanggulangan

kebencanaan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa BPBD Kota Ternate memainkan peran sentral sebagai koordinator lintas sektor dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Dalam pelaksanaan kolaborasi, BPBD menggandeng berbagai aktor seperti media massa, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat melalui pendekatan penta helix. BPBD juga aktif dalam edukasi kebencanaan, penyusunan peta jalur evakuasi alternatif, pembentukan desa tangguh bencana, serta penguatan sistem peringatan dini. Namun, terdapat hambatan kolaborasi yang cukup signifikan seperti banjir susulan, keterbatasan akses, rendahnya kesadaran masyarakat, belum diperbarunya peta rawan bencana, serta kurang optimalnya peran dunia usaha dan akademisi dalam implementasi kebijakan. Untuk mengatasi hal ini, BPBD melakukan serangkaian upaya seperti peningkatan pelatihan, koordinasi intensif, serta kerja sama dengan media lokal guna menjaga akurasi informasi bencana. Jika dibandingkan dengan penelitian Dyah Ningrum Sekartaji et al. (2022) di Kota Baubau, yang menekankan pentingnya kebijakan formal berupa peraturan daerah dalam memperkuat peran BPBD, penelitian ini juga menunjukkan perlunya regulasi yang lebih responsif terhadap kondisi daerah, khususnya dalam pembaruan peta rawan bencana.

Penelitian Nurul Sahira (2023) di Aceh Utara dan Aditya Setiawan dkk. (2024) di Balikpapan, yang membagi peran BPBD ke dalam tiga tahap bencana, memiliki kemiripan dengan temuan penelitian ini, tetapi penelitian di Ternate memperkaya aspek kolaboratif dengan memasukkan media massa dan pendekatan berbasis komunitas seperti desa tangguh bencana. Sementara itu, penelitian Hendra Irawan Umabaihi dkk. (2022) di Kepulauan Sula menyoroti lemahnya keterlibatan akademisi dalam kolaborasi. Temuan penelitian ini menunjukkan perbaikan, di mana akademisi mulai terlibat dalam pemetaan risiko dan kegiatan trauma healing, meskipun masih belum maksimal.

Penelitian Saipullah Hasan dkk. (2024) di Magelang menunjukkan inovasi teknologi berupa aplikasi SIKK sebagai alat penyebaran informasi bencana. Meskipun belum memiliki aplikasi serupa, BPBD Ternate telah mengembangkan media center untuk mengoordinasikan informasi lintas media, yang menjadi alternatif inovatif dalam konteks lokal. Berbeda dengan penelitian Sri Indarti dkk. (2023) di Bengkulu yang menilai peran BPBD belum optimal, penelitian ini menegaskan bahwa BPBD Ternate telah menjalankan peran cukup efektif namun terhambat oleh faktor eksternal, bukan kelemahan internal.

Penelitian Irvan Harnanda (2021) di Riau dan Tri Anggraini (2021) di Musi Banyuasin menunjukkan keberhasilan BPBD dalam menjalin kerja sama dengan sektor usaha. Penelitian di Ternate menunjukkan potensi serupa, namun partisipasi sektor swasta masih bersifat insidental melalui program CSR dan belum terintegrasi dalam sistem kolaborasi yang berkelanjutan. Akhirnya, penelitian Pujianti dan Gerry Katon (2023) di Yogyakarta, yang menyoroti peran BPBD sebagai inovator dan stabilisator, juga tercermin dalam penelitian ini, terutama dalam upaya BPBD Ternate membangun jalur alternatif dan menyusun pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat pendekatan Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008) dan model Penta Helix, dengan menegaskan bahwa efektivitas penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh keterpaduan dan sinergi antar aktor dari berbagai sektor. Penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi dengan mengangkat tantangan-tantangan spesifik lokal dan inovasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Ternate dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih adaptif dan kolaboratif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, mengenai Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Kolaborasi Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir berperan sebagai koordinator utama (leading sector) .Sebagai koordinator utama dalam proses penanggulangan bencana, BPBD bertanggung jawab untuk memastikan seluruh proses penanggulangan bencana mulai dari Pra Bencana, Tanggap Darurat, hingga Pasca Bencana berjalan secara terkoordinasi dan efektif. Selain itu, BPBD juga melakukan kolaborasi lintas sektor dengan pihak lain, yaitu Media Massa, Akademisi, Pihak Swasta, dan Masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini diwujudkan melalui koordinasi teknis, penyebaran berita ke masyarakat, melakukan pelatihan kebencanaan, serta menyalurkan bantuan logistik.
2. Meskipun peran yang dilakukan BPBD sudah cukup efektif, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi. Terjadinya banjir susulan dalam proses evakuasi, kesulitan akses dalam menuju lokasi terdampak, serta sulitnya melakukan koordinasi lintas sektor merupakan faktor utama yang menghambat. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan salah satu penghambat yang sering kali luput dari perhatian.
3. BPBD terus melakukan upaya dalam mengatasi segala hambatan yang ada, terutama dengan membangun sistem komando terpadu yang dipimpin langsung oleh BPBD. Membuat rapat koordinasi secara rutin, memperkuat komunikasi yang baik antar instansi, serta mengadakan pelatihan penanggulangan bencana membuktikan bahwa BPBD selalu berupaya agar hambatan hambatan tersebut dapat diatasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya waktu pelaksanaan penelitian, yang menyebabkan ruang gerak dalam pengumpulan data menjadi relatif sempit. Selain itu, keterbatasan juga muncul dari sisi informan, di mana waktu yang tersedia untuk wawancara sangat terbatas dan tidak menentu, sehingga peneliti harus menyesuaikan jadwal sesuai dengan ketersediaan informan yang sering berubah-ubah.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dan pendekatan yang digunakan, guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kolaborasi dalam penanggulangan bencana. Penelitian berikutnya dapat melakukan penelitian dengan fokus pada efektivitas model pentahelix secara menyeluruh, melibatkan seluruh unsur kolaborator seperti pihak swasta, akademisi, media massa, dan masyarakat secara lebih merata dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta dukungan moril dan materil selama penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Simangunsong. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Ipdn Press.
Zulkifli, & Tahir, M. I. (2023). *Pemerintah daerah: Antara inovasi, kinerja organisasi, dan pelayanan publik*. Epigraf Komunikata Prima.

- A Setiawan, K Rusba, M Ramadan, D Saputra, & A Swandito. (2024). *Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Balikpapan*. <https://jurnal.d4k3.uniba-bpn.ac.id>
- Alnizar Zagarino, Dhea Cika Pratiwi, Rika Nurhayati, & Diana Hertati. (2021). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Erupsi Gunung Semeru Di Kabupaten Lumajang*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i5.224>
- Bukhari, S. A. S., Shafi, I., Ahmad, J., Villar, S. G., Villena, E. G., Khurshaid, T., & Ashraf, I. (2024). Review of flood monitoring and prevention approaches: a data analytic perspective. Dalam *Natural Hazards*. Springer Science and Business Media B.V. <https://doi.org/10.1007/s11069-024-07050-w>
- DN Sekartaji, A Sadat, & N Nastia. (2022). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Dalam Penanggulangan Bencana Alam*. <https://doi.org/10.47492/jip.v3i7.2202>
- Earl, E., Johnson, F., Marshall, L., & Sanderson, D. (2023). A critical review of Natural Flood Management application and spatial prioritisation approaches in tropical island catchments. Dalam *Science of the Total Environment* (Vol. 878). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162776>
- Hendra Irawan Umabaihi, Nurliah Nurdin, & Romli Arsyad. (2022). *Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula*. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9936>
- Irvan harnanda. (2021). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau (Studi Kabupaten Rokan Hilir)*. <https://repository.uir.ac.id/view/divisions/IAS2/2022.default.html>
- Li, C., Jiang, C., Chen, J., Lam, M. Y., Xia, J., & Ahmadian, R. (2025). An overview of flood evacuation planning: Models, methods, and future directions. Dalam *Journal of Hydrology* (Vol. 656). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.133026>
- N Sahira. (2023). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Utara*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30608/>
- Pujianti, & Gerry Katon Mahendra. (2023). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Pandeyan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta*. <https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1457>
- Saipullah Hasan, Ilham Khusaini, Aisyah Febrianti, & Tiara Damayanti. (2024). *Peran BPBD dalam Penanganan Bencana Angin Kencang di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang*. <https://doi.org/10.35878/alitimad.v2i2.1345>
- Sri Indarti, Reni Insiroh, & Titi Darmi. (2023). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu*. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i2.5202>
- Tri Anggraini, & Dimas Agustian. (2021). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kabupaten Musi Banyuasin*. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1510>
- Yahya, A. S., Kusmana, D., Ismunarta, & Sururama, R. (2024). Collaborative governance dalam penanganan kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Media Birokrasi*, 6(1). <https://doi.org/10.33701/jmb.v6i1.4151>